KORUPSI KEPALA DAERAH DAN AKIBATNYA
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA)

Sriwati
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstract
Corruption, especially those made by the provincial government is strictly forbidden by the rules of legislation that occurred or religion. Corruption has impact to all aspects of social life, makes social life collapse, political disorder, the economy becomes sluggish and inefficient bureaucracy.

Keywords: Corruption, impact of corruption

PENDAHULUAN
Korupsi menjadi sebuah permasalahan besar dan berkepanjangan di negara Indonesia, bahkan prosentase terjadinya tindak pidana korupsi di negara Indonesia menduduki posisi teratas di antara negara-negara lain di Asia Pasifik. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyatakan bahwa posisi Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara se-Asia Pasifik. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini telah gagal total.1


Tindak pidana korupsi ini semakin hari terus meningkat, tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan (Jakarta), namun hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Jakarta menyatakan bahwa hampir seluruh kepala daerah di negeri ini terkait kasus korupsi, ada yang berstatus tersangka dan ada yang berstatus terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang kepala daerahnya tidak terjerat perkara hukum. Banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum dirasakan di daerah.3

Negeri ini sudah menanggung malu sebab selalu masuk golongan negara paling korup di dunia, namun lebih memalukan lagi